

BAB II

PROFIL DAN PRODUK WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) JAWA TENGAH

2.1 Profil Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam WALHI Indonesia, organisasi non-pemerintah terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang lingkungan hidup. Sejak 35 tahun yang lalu hingga kini, WALHI Jawa Tengah masih aktif menjalankan perannya untuk memperjuangkan perlindungan, pemulihan, dan pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat maupun pemerintah setempat, baik di perkotaan maupun pedesaan, untuk menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Secara keseluruhan, WALHI Jawa Tengah memiliki visi untuk mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang adil serta demokratis, untuk memastikan seluruh hak-hak masyarakat atas sumber daya kehidupan dan keberlanjutan lingkungan dapat terpenuhi.

Gambar 2. 1 Logo WALHI Jawa Tengah



Sumber: WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah berupaya menentang pengaruh sistem kapitalisme global serta dampak dari kebijakan pasar bebas yang seringkali mengesampingkan aspek lingkungan hidup, terutama di tengah peningkatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan (WALHI Jawa Tengah, n.d.). Bentuk dominasi

semacam ini berpotensi memicu ketidakseimbangan ekosistem, krisis lingkungan, serta ketidakadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, WALHI Jawa Tengah menuntut adanya kebijakan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak eksploitasi. Oleh sebab itu, WALHI Jawa Tengah menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi baik. Untuk itu WALHI terus berupaya memastikan hak tersebut diakui dan dipenuhi di tingkat provinsi, agar setiap individu memperoleh hak yang setara terhadap lingkungan layak huni dan terjaga kelestariannya.

WALHI Jawa Tengah mengutamakan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai landasan utama dalam setiap upaya penyelamatan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan visinya untuk menciptakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan, organisasi ini berkomitmen akan melindungi serta menjamin hak masyarakat terhadap akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan yang semakin rumit, WALHI Jawa Tengah terus mengembangkan berbagai inisiatif berbasis masyarakat yang mendorong keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan solusi jangka panjang yang juga bermanfaat bagi generasi yang akan datang (WALHI Jawa Tengah, n.d.).

Kampung Nelayan Tambakrejo, merupakan salah satu wilayah binaan WALHI Jawa Tengah yang telah memperoleh edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Dalam edukasi ini, WALHI Jawa Tengah menekankan pentingnya mengurangi serta mengelola sampah secara bijak sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

2.2 Produk & Layanan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah merupakan organisasi yang bersifat independen dan non-profit, dan memiliki fokus pada upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, serta memperjuangkan keadilan ekologis di wilayah Jawa Tengah. Sebagai bagian dari jaringan WALHI nasional, WALHI Jawa Tengah menjalankan mandat untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, melakukan

advokasi kebijakan, serta memperkuat gerakan lingkungan berbasis komunitas. Produk dan layanan yang dikembangkan oleh WALHI Jawa Tengah tidak bersifat komersial, melainkan berupa *public goods* yang bertujuan untuk mendorong perubahan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

Produk atau layanan pertama adalah advokasi terkait kebijakan dan hukum terkait lingkungan. WALHI Jawa Tengah secara aktif melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Melalui pendekatan yang strategis, organisasi ini mengadvokasi perumusan dan implementasi kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk melalui keterlibatan dalam forum-forum legislatif dan eksekutif, serta penggunaan jalur litigasi maupun non-litigasi.

Salah satu bentuk konkret layanan advokasi yang dilakukan WALHI Jawa Tengah adalah keterlibatannya dalam proses advokasi warga Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang terdampak oleh operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, warga menghadiri undangan diskusi dari pemerintah Kota Surakarta dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai tindak lanjut dari aduan terkait dampak lingkungan PLTSa yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat (WALHI Jawa Tengah, 2024).

Gambar 2. 2 Proses Advokasi WALHI Jawa Tengah dan Warga Jatirejo



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah elemen pemerintah, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup, UPT

TPA, Camat Jebres, serta pengelola PLTSa dan perwakilan warga terdampak. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesepakatan teknis, seperti pembangunan paranet sebagai penghalang debu, sebagian besar tuntutan warga belum memperoleh kesepakatan. WALHI Jawa Tengah bersama warga tetap mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dapat dipenuhi, serta untuk memastikan adanya tanggung jawab korporasi dan negara terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Produk atau layanan kedua adalah pendampingan komunitas terdampak. Salah satu kekuatan utama WALHI Jawa Tengah adalah pendampingan kepada komunitas yang menjadi korban konflik lingkungan, seperti akibat proyek infrastruktur skala besar, ekspansi industri ekstraktif, atau pencemaran lingkungan. Pendampingan dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi lokal, serta dukungan dalam proses advokasi dan pemulihan hak-hak atas lingkungan yang sehat.

WALHI Jawa Tengah mendampingi warga Desa Penawangan, Kabupaten Semarang, yang menolak rencana pertambangan oleh PT Joglosemar Purnama Jaya di atas lahan sawah masyarakat setempat. Warga menyampaikan keberatan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada 21 Juni 2024, dan menekankan bahwa lahan tersebut termasuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah RTRW (WALHI Jawa Tengah, 2023). Kedua instansi merespon positif dan menyatakan akan mengevaluasi perizinan berdasarkan laporan warga. Pendampingan seperti ini mencerminkan komitmen WALHI Jawa Tengah dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2. 3 Proses Pendampingan WALHI Jawa Tengah dan Warga Desa Penawangan



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Produk atau layanan ketiga adalah kajian dan riset ekologis. WALHI Jawa Tengah memproduksi berbagai riset dan kajian yang mendalam untuk mendukung upaya advokasi dan edukasi publik. Kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan dari suatu proyek, peta konflik ekologis, serta studi sosial-ekologis yang berbasis data lapangan. Hasil kajian ini tidak hanya digunakan untuk kampanye, tetapi juga sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi.

Salah satu contoh konkret dari layanan ini adalah laporan penelitian mengenai pencemaran logam berat di Perairan Teluk Semarang. Melalui riset kolaboratif bersama Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI), WALHI Jawa Tengah menggunakan pendekatan ekologi politik kualitas air untuk mengungkap kompleksitas persoalan pencemaran dan dampaknya terhadap nelayan budidaya kerang di wilayah tersebut. Kajian ini dilakukan dengan melakukan ulasan terhadap 21 artikel, studi arsip, serta hasil kerja lapangan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Sungai Banjir Kanal Timur, dan Kawasan Industri Terboyo. Hasil dari penelitian ini mengungkap adanya keberadaan lima jenis logam berat berbahaya yakni timbal (Pb), tembaga (Cu), seng (Zn), besi (Fe), dan kadmium (Cd) yang mencemari perairan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta ekosistem pesisir.

Temuan ini tidak hanya menjadi dasar kampanye penghentian aliran limbah industri ke laut, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga praktik budidaya kerang yang terbukti ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Selanjutnya melalui kajian ini dipetakan dua pendekatan dari saran para peneliti pendahulu

yakni Pertama, mengurangi konsumsi kerang dari area tercemar logam berat, meskipun ini berisiko menurunkan produktivitas nelayan yang bergantung pada budidaya kerang sebagai ketahanan terhadap risiko lingkungan. Kedua, mengurangi pasokan logam berat ke Teluk Semarang, yang lebih menyorot masalah hulu dan mengatasi ketidakadilan lingkungan antara industri dan nelayan. Rekomendasi lainnya mencakup pengembangan model konseptual pencemaran logam berat dan penelitian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia dan perubahan iklim (WALHI Jawa Tengah, 2025)

Dengan riset-riset seperti ini, WALHI Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam membangun basis pengetahuan yang kuat untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan melindungi kelompok rentan yang menjadi korban dalam pencemaran lingkungan.

Gambar 2. 4 Kajian & Riset Ekologis WALHI terkait Pencemaran Logam Berat



Sumber: Dokumen Pribadi

Produk atau layanan keempat adalah kampanye publik dan edukasi lingkungan. Sebagai bagian dari strategi perubahan sosial, WALHI Jawa Tengah rutin menggelar kampanye publik untuk membangun kesadaran masyarakat luas terhadap isu-isu lingkungan. Kegiatan ini mencakup kampanye media, diskusi publik, pelatihan, serta kolaborasi seni dan budaya sebagai media ekspresi ekologis. Selain itu, edukasi lingkungan dilakukan secara inklusif dengan menyorot berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga petani dan nelayan.

Gambar 2. 5 Kampanye Publik WALHI Jawa Tengah dalam Sedekah Laut



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Salah satu contoh kampanye publik dan edukasi lingkungan oleh WALHI Jawa Tengah adalah kolaborasi dalam acara Sedekah Laut bersama nelayan Dukuh Roban Timur, Kabupaten Batang, pada 21 Juli 2024 (WALHI Jawa Tengah, 2024). Acara ini digunakan sebagai momentum kampanye penyelamatan pesisir yang terancam abrasi akibat perubahan arus laut pasca pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Warga bersama WALHI Jawa Tengah membentangkan menyuarakan kondisi krisis ekologi di wilayah tersebut, dan kampanye berbentuk kegiatan edukasi ini menekankan pentingnya perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan hak nelayan.

Produk atau layanan terakhir adalah penguatan jaringan dan koalisi gerakan rakyat. WALHI Jawa Tengah menjadi penghubung bagi berbagai organisasi rakyat, komunitas lokal, akademisi, dan kelompok muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Melalui jejarin ini, WALHI Jawa Tengah mendorong lahirnya kolaborasi yang kuat dalam memperjuangkan agenda keadilan ekologis, serta memperluas dampak gerakan lingkungan di tingkat lokal hingga tingkat nasional.

Gambar 2. 6 Kolaborasi WALHI Jawa Tengah dengan JKPM dan AP2SI



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Salah satu wujud konkret dari penguatan jaringan ini adalah kolaborasi antara WALHI Jawa Tengah, Jaringan Kerja Pendampingan Masyarakat (JKPM) Wonosobo, dan AP2SI dalam rapat koordinasi di Wonosobo pada 13 Januari 2025 (WALHI Jawa Tengah, 2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya di wilayah ekosistem esensial seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto dan Serayu. Fokus utama mencakup integrasi perlindungan lingkungan dan ekonomi lokal melalui pendekatan seperti agroforestri dan jasa lingkungan.

Dengan landasan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem, WALHI Jawa Tengah berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas krisis ekologis yang dihadapi masyarakat. Seluruh produk dan layanan yang dijalankan bertujuan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terpenuhi, serta menjamin bahwa sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

2.3 Stakeholder Internal & Eksternal WALHI Jawa Tengah

2.3.1 Stakeholder Internal

Struktur organisasi internal WALHI di wilayah Jawa Tengah disusun sesuai dengan pedoman dalam statuta organisasi. Struktur ini tersusun dari empat organ utama yang peran dan fungsi strategis dalam operasional organisasi, yaitu: Keanggotaan, Dewan Daerah, Eksekutif Daerah, dan organ di tingkat Nasional (Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional). Setiap organ memiliki mandat yang berbeda, namun secara keseluruhan saling melengkapi

dalam menjamin proses pengambilan keputusan yang demokratis, representasi gender yang inklusif, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

2.3.1.1 Anggota WALHI Jawa Tengah

Keanggotaan WALHI terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu organisasi non-pemerintah dan individu perseorangan yang memenuhi dalam Pasal 4 dan 5 Statuta WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Setiap anggota, baik lembaga maupun individu, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat (hak bicara) dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (hak suara) di seluruh forum resmi organisasi. Di samping itu, anggota juga berkewajiban untuk mematuhi statuta serta seluruh keputusan kelembagaan yang telah disepakati. Berikut persyaratan utama untuk menjadi anggota WALHI:

- Tidak ada keterkaitan langsung dengan partai politik, korporasi, maupun institusi negara termasuk TNI dan Polri.
- Memiliki pengalaman kerja advokasi di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia, minimal tiga tahun untuk organisasi dan empat tahun untuk individu.
- Bagi organisasi, sebagai syarat tambahan diharapkan sudah memiliki struktur kepengurusan yang jelas serta program kerja yang sistematis sebagai bukti kapasitas kelembagaan.
- Mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari tiga anggota WALHI yang telah tergabung terlebih dahulu sebagai bentuk akuntabilitas internal.
- Memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan komitmen untuk tunduk dan mematuhi statuta serta seluruh keputusan organisasi.

Beberapa lembaga yang menjadi anggota WALHI Jawa Tengah antara lain: Yayasan Abdi Umat, Pelita Bangsa, Mitapahsa (KPA-UIN Salatiga), Selendang Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Semarang, Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS), Suphel Karanganyar, dan LMIH Karanganyar.

2.3.1.2 Dewan Daerah

Salah satu *stakeholder* internal WALHI adalah Dewan Daerah yang berfungsi sebagai representasi dari anggota di tingkat daerah. Dewan Daerah dibentuk secara demokratis melalui forum tertinggi di tingkat wilayah, yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), di mana anggota memilih secara langsung dan mengesahkan perwakilan yang terpilih. Dewan ini memiliki peran strategis yakni, melakukan pengawasan, merumuskan arah kebijakan organisasi tingkat daerah, serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai perjuangan WALHI di tingkat lokal.

Jumlah anggota dalam Dewan Daerah terdiri dari minimal tiga dan maksimal lima orang, dengan salah satu di antaranya ditunjuk sebagai ketua (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Pemilihan anggota tidak hanya mempertimbangkan kapasitas dan pengalaman, tetapi juga menekankan prinsip inklusivitas melalui pemberian ruang yang setara bagi representasi seluruh identitas gender. Pendekatan ini mencerminkan komitmen WALHI terhadap terciptanya ruang organisasi yang inklusif, adil, dan menjunjung tinggi keadilan gender.

Masa jabatan anggota Dewan Daerah berlangsung selama empat tahun untuk setiap periode (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Setiap anggota diizinkan kembali mencalonkan diri dan dipilih untuk satu periode berikutnya, namun tidak boleh menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong proses regenerasi kepemimpinan, menjaga dinamika organisasi tetap hidup, serta membuka ruang bagi munculnya ide-ide baru yang relevan dengan perkembangan gerakan lingkungan di tingkat daerah.

2.3.1.3 Eksekutif Daerah

Stakeholder internal WALHI lainnya adalah Eksekutif Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh kebijakan, program kerja, dan pengelolaan keuangan di tingkat wilayah, sesuai dengan keputusan yang diambil dalam forum tertinggi wilayah, yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH). Sebagai pelaksana, Eksekutif Daerah memiliki peran utama menjadi penjamin bahwa mandat strategis organisasi yang diperoleh melalui proses demokratis dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip WALHI.

Struktur ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif Daerah yang dipilih langsung oleh anggota dalam forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), atau dalam situasi tertentu melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB). Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan partisipatif yang mencerminkan prinsip demokrasi internal serta akuntabilitas kepada konstituen organisasi. Direktur Eksekutif memiliki mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program advokasi, pengorganisasian komunitas, kampanye, serta menjamin sumber daya organisasi dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dalam satu periode masa jabatan anggota Dewan Daerah berlangsung selama empat tahun (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Guna menjaga keberlanjutan sekaligus mendorong proses regenerasi kepemimpinan, seorang Direktur Eksekutif hanya diperbolehkan menjabat kembali untuk satu periode berikutnya. Batasan ini dibentuk sebagai komitmen organisasi untuk mendorong terciptanya kepemimpinan baru yang progresif dan menghindari sentralisasi kekuasaan pada satu individu.

2.3.1.4 Eksekutif Nasional

Eksekutif Nasional adalah salah satu *stakeholder* internal WALHI yang bertanggung jawab sebagai pelaksana utama di tingkat nasional. Eksekutif Nasional memegang mandat strategis untuk

melaksanakan kebijakan organisasi, menentukan arah politik, merancang program kerja, serta mengelola keuangan secara menyeluruh. Seluruh kegiatan ini berlandaskan pada keputusan yang ditetapkan dalam forum tertinggi organisasi di tingkat nasional, yaitu Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) dan/atau Kongres Nasional Lingkungan Hidup (KNLH). Eksekutif Nasional berperan dalam menjaga kesinambungan gerakan WALHI dari tingkat lokal hingga tingkat nasional, serta membangun hubungan dengan jaringan advokasi di tingkat internasional (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021).

Pada tingkat nasional WALHI dipimpin oleh Direktur Eksekutif Nasional, yang dipilih secara langsung oleh perwakilan anggota melalui proses demokratis dalam forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), atau pada kondisi tertentu melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB). Proses pemilihan ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip transparansi, partisipasi anggota, dan akuntabilitas internal. Direktur Eksekutif Nasional memegang tanggung jawab utama mengkoordinasikan seluruh implementasi strategi organisasi. Tanggung jawab tersebut mencakup pengembangan kebijakan publik, pelaksanaan kampanye nasional, kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, serta memperkuat kapasitas kelembagaan WALHI di seluruh wilayah (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021).

2.3.1.5 Dewan Nasional

Dewan Nasional merupakan *stakeholder* internal WALHI yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional, serta berfungsi sebagai perwakilan kolektif dari seluruh anggota organisasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Dewan Nasional dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis dan disahkan dalam forum tertinggi organisasi di tingkat nasional, yakni Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Proses ini mencerminkan komitmen WALHI terhadap prinsip

partisipatif dan keterwakilan, di mana setiap anggota memiliki peran aktif dalam menentukan arah kepemimpinan serta pengawasan terhadap gerakan lingkungan hidup secara nasional.

Setiap individu yang terpilih menjadi anggota Dewan Nasional diwajibkan telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan kepemimpinan WALHI. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman calon pemimpin mengenai nilai-nilai dasar gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta prinsip tata kelola organisasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Pendidikan ini merupakan salah satu syarat utama yang bertujuan memastikan bahwa setiap anggota Dewan memiliki kemampuan analitis, integritas moral, dan etika kepemimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur Dewan Nasional WALHI terdiri dari minimal lima orang dan maksimal tujuh orang anggota, yang dipilih secara inklusif dan memperhatikan representasi lintas gender (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Mekanisme ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip keadilan gender dan keberagaman dalam struktur kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar WALHI yang mengedepankan nilai kesetaraan.

Anggota Dewan Nasional menjabat selama empat tahun dalam satu periode kepemimpinan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Untuk memastikan terjadinya regenerasi dan pembaruan dalam struktur organisasi, regulasi internal WALHI membatasi seorang anggota Dewan untuk menjabat paling banyak dua periode secara berturut-turut.

2.3.2 Stakeholder Eksternal

WALHI Jawa Tengah beroperasi dalam sebuah ekosistem gerakan yang melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai *stakeholder* utama dalam misi perlindungan lingkungan hidup serta penguatan hak-hak masyarakat. Para *stakeholder* eksternal ini memiliki beragam peran, baik sebagai mitra kolaboratif, sasaran advokasi, maupun penerima manfaat dari program yang

dijalankan organisasi. Keterlibatan mereka berkontribusi pada tercapainya tujuan strategis WALHI Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini adalah kelompok-kelompok stakeholder eksternal WALHI Jawa Tengah.

2.3.2.1 Komunitas dan Masyarakat Lokal

Komunitas dan masyarakat lokal merupakan *stakeholder* dalam pelaksanaan berbagai program WALHI Jawa Tengah. Masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak krisis ekologis, seperti konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga bencana ekologis yang ditimbulkan akibat proyek pembangunan skala besar. Salah satu contoh kasusnya adalah masyarakat petani di Jepara, yakni warga Dukuh Toplek, yang terdampak oleh alih fungsi lahan dan pencemaran akibat aktivitas industri. WALHI Jawa Tengah melakukan pendampingan melalui penguatan kapasitas organisasi masyarakat, memberi pelatihan advokasi, serta membantu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut juga termasuk upaya mediasi konflik serta penguatan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan.

2.3.2.2 Organisasi Masyarakat Sipil dan Jaringan Gerakan Sosial

WALHI Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) serta jaringan sosial, seperti serikat petani, organisasi pemuda, kelompok perempuan, dan jaringan advokasi. Bentuk kerja sama ini membuka ruang bagi terbentuknya solidaritas lintas sektor dan wilayah, yang tidak hanya memperkuat posisi masyarakat sipil dalam mendorong transformasi kebijakan, namun juga memperluas jangkauan pengaruh kampanye lingkungan di ruang publik.

Salah satu organisasi yang bekerjasama dengan WALHI Jawa Tengah adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Tengah. Kolaborasi ini berfokus pada pengarusutamaan perspektif perempuan dalam isu lingkungan dan agraria, termasuk advokasi

bersama terhadap kebijakan yang berdampak negatif terhadap kelompok rentan serta pelibatan aktif perempuan dalam berbagai agenda penyelamatan lingkungan, terutama di kawasan perdesaan.

2.3.2.3 Media Massa dan Jurnalis Independen

Media memiliki fungsi strategis dalam proses edukasi masyarakat, penyebaran informasi, serta pengawasan terhadap praktik kekuasaan. WALHI Jawa Tengah aktif membangun hubungan dengan kalangan jurnalis dan media independen guna memastikan isu-isu lingkungan tidak hanya menjadi perhatian komunitas tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari agenda publik yang lebih luas. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh WALHI adalah program Media Fellowship bertajuk “*Jurnalis Peduli Pesisir, Selamatkan Urip Wong Jateng*”, yang melibatkan jurnalis muda dan pers mahasiswa dalam kegiatan pelatihan serta peliputan langsung terhadap berbagai isu lingkungan pesisir di Jawa Tengah, seperti abrasi dan kerusakan ekosistem. Media berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas negara maupun korporasi terhadap kerusakan lingkungan, melalui pemberitaan yang berbasis pada data dan fakta lapangan. Melalui kolaborasi ini, media berfungsi sebagai penyampai informasi, sekaligus sebagai pengawas sosial dan agen perubahan yang memperkuat advokasi ruang dialog demi mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekologis.

2.3.2.4 Akademisi dan Institusi Pendidikan

Kerja sama dengan kalangan akademisi dan institusi perguruan tinggi membantu memperkuat dasar ilmiah serta mendorong analisis kritis terhadap berbagai isu lingkungan. Perguruan tinggi juga berfungsi sebagai ruang strategis untuk edukasi lingkungan, pengembangan kurikulum alternatif, serta pembentukan kesadaran ekologis bagi generasi muda. Sebagai contoh, dalam menolak pembangunan proyek tanggul laut besar di Pantura, WALHI Jawa Tengah tergabung dalam koalisi Maleh Dadi Segoro yang bekerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) melalui Sustainable Development

Research Center serta Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA).

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran di kalangan akademisi, WALHI aktif mendukung dan menginisiasi berbagai program pendidikan lingkungan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan dosen, seperti penelitian kolaboratif, pelatihan, diskusi publik, dan aksi lapangan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat kapasitas ilmiah dan upaya advokasi, tetapi juga mendorong gerakan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan.

2.3.2.5 Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Pemerintah daerah dan lembaga negara Sebagai pemangku kebijakan memegang peran sentral dalam menentukan arah pembangunan, perlindungan lingkungan, serta mengatur perizinan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kedua pihak ini menjadi mitra dialog sekaligus target utama dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh WALHI Jawa Tengah.

Melalui pendekatan yang bersifat kritis - konstruktif, WALHI Jawa Tengah berupaya mendorong terciptanya regulasi serta pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Partisipasi WALHI diimplementasikan melalui keterlibatan dalam proses konsultasi, pemantauan kebijakan publik, serta pelaporan pelanggaran lingkungan sebagai bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam menjaga integritas pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2. 1 Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Institusi	Peran dan Hubungan dengan WALHI Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mitra advokasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebijakan perubahan iklim, dan pengawasan izin industri ekstraktif.
DLHK Provinsi/Kabupaten	Pihak teknis dalam pengelolaan lingkungan, mitra diskusi kebijakan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran.
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Forum strategis untuk mendorong integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Jawa Tengah	Sasaran advokasi legislasi dan pengawasan kebijakan pro-lingkungan serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan SDA.
KLHK Wilayah Jawa	Terlibat dalam advokasi konflik agraria, penguasaan lahan, dan hak atas tanah komunitas lokal.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah	Saluran pengaduan dan pengawasan atas maladministrasi dalam pelayanan publik terkait izin lingkungan.
Komnas HAM Perwakilan Jawa Tengah	Mitra dalam advokasi keadilan ekologis dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.3.2.6 Sektor Swasta dan Koperasi

Hubungan antara WALHI dengan sektor swasta bersifat kompleks dan memiliki dua sisi. Di satu sisi, WALHI aktif melakukan pengawasan serta advokasi terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk melalui jalur hukum dan kampanye publik. Namun, di sisi lain, WALHI juga mendorong pengembangan ekonomi alternatif yang berlandaskan pada koperasi rakyat, pertanian berkelanjutan, serta industri kecil yang ramah lingkungan. Kemitraan dengan koperasi dan pelaku usaha lokal yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis menjadi bagian dari strategi WALHI dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.

WALHI memiliki berbagai strategi dalam berinteraksi dengan sektor swasta, mulai dari kampanye publik, litigasi strategis, hingga kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, WALHI juga mengoptimalkan pemanfaatan media dan teknologi untuk memperluas jangkauan pesan advokasi lingkungan. Dengan cara ini, WALHI berupaya mengurangi praktik industri yang merusak sekaligus membangun alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sosial, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam upaya mendukung energi bersih dan terbarukan, WALHI Jawa Tengah aktif menginisiasi program edukasi mengenai perubahan iklim serta pemanfaatan energi terbarukan bersama pemuda di Jawa Tengah. Salah satu contoh kegiatan yang dilaksanakan adalah Youth Climate Camp pada tahun 2018 (WALHI, 2018), yang didukung oleh Lembaga Kemitraan dan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia. Program ini berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam proses transisi penggunaan energi terbarukan.

2.3.2.7 Donor dan Mitra Pembangunan

Donor dan mitra pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan berbagai program WALHI, baik melalui pemberian dukungan finansial, bantuan teknis, maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan finansial yang diterima memungkinkan WALHI melaksanakan program advokasi, edukasi, penelitian, serta kampanye lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, dukungan teknis dari mitra pembangunan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui transfer pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan yang memperkuat kapabilitas organisasi maupun komunitas yang terlibat.

WALHI Jawa Tengah selalu berusaha menjalin hubungan yang transparan dan bertanggung jawab dengan para donor dengan memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan selaras dengan

nilai-nilai dan mandat organisasi. Mitra pembangunan juga berfungsi sebagai penghubung dalam proses pertukaran pengetahuan serta peningkatan efektivitas gerakan lingkungan di tingkat global.

Sebagai contoh, WALHI Jawa Tengah tergabung dalam konsorsium FOCUS yang dipimpin oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), bersama dengan KIARA dan PKSPL IPB University. Konsorsium ini menerima dukungan pendanaan dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) untuk melaksanakan program pengelolaan pesisir terpadu di wilayah Jawa Tengah (HIVOS, 2022). Dalam konsorsium tersebut, WALHI berperan dalam kegiatan advokasi, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, pelaksanaan kampanye bersama, serta pemantauan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Jawa Tengah.